

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak di Kota Batam terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh munculnya kasus baru, tetapi juga akibat terungkapnya kasus lama seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan keberanian korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) telah mengupayakan pelaksanaan program perlindungan khusus anak. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta hambatan komunikasi dengan korban yang mengalami trauma cenderung memperlambat penanganan kasus. Selain itu, faktor-faktor seperti permasalahan ekonomi, konflik dalam keluarga, lingkungan sosial yang kurang memahami hak-hak anak, serta kondisi fisik anak turut menjadi penyebab terjadinya kekerasan. Dengan mengatasi berbagai kendala tersebut, diharapkan implementasi program perlindungan khusus anak di Kota Batam dapat berjalan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak secara menyeluruh.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas implementasi program perlindungan khusus anak di Kota Batam yakni:

1. Pemerintah Kota Batam perlu meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai bagi UPTD PPA, seperti memperbaiki gedung UPTD PPA agar menjadi lebih baik dan nyaman serta penambahan moling (mobil keliling) untuk menjangkau lokasi-lokasi terjadinya kekerasan. Sarana yang memadai akan membantu mempercepat proses layanan dan meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
2. Diperlukan penambahan jumlah sumber daya manusia di UPTD PPA yang memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Penambahan SDM perlu diimbangi dengan seleksi yang ketat dan berbasis keahlian, khususnya dalam bidang psikologi, hukum perlindungan anak, serta konseling trauma. Dengan SDM yang cukup dan kompeten, penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan menyeluruh.
3. Kerja sama antarlembaga harus diperkuat, baik antara instansi pemerintah, lembaga perlindungan anak, kepolisian, rumah sakit, sekolah, maupun organisasi masyarakat. Koordinasi yang sinergis dan berkelanjutan antar lembaga akan menciptakan sistem perlindungan yang lebih terpadu serta mempercepat proses penanganan dan pemulihan korban kekerasan.
4. Seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program perlindungan anak, khususnya petugas lapangan, perlu mendapatkan pelatihan secara berkala. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman terhadap dinamika kekerasan terhadap anak, serta kemampuan dalam melakukan pendekatan yang empatik, profesional, dan berbasis hak anak. Dengan pelatihan berkelanjutan, diharapkan para petugas mampu memberikan layanan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan korban.

Dengan adanya perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, diharapkan implementasi program perlindungan khusus anak di Kota Batam dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan, serta memberikan perlindungan nyata bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan.